

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial berakar dari frasa yang mencerminkan situasi kehidupan umum dalam masyarakat. Sorokin, dalam tulisan yang disusun oleh Kurniati Abidin dalam buku Pengantar Sosiologi dan Antropologi, mengemukakan bahwa stratifikasi sosial merujuk pada pengelompokan warga atau masyarakat ke dalam hierarki kelas. Model pelaksanaannya mencakup lapisan atas dan kelas bawah. Bentuk stratifikasi dalam tatanan sosial telah ada sejak manusia pertama kali hidup dalam komunitas masyarakat. Pada awalnya, perubahan ini bergantung pada segregasi berdasarkan jenis kelamin, pemisahan antara pemimpin dan pengikut, alokasi tugas, dan sejenisnya.¹

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Toraja dikenal dengan system kasta yaitu *tana' bulaan* (bangsawan asli), *tana' bassi* (bangsawan campuran), *tana' karurung* (masyarakat biasa/orang merdeka), dan *tana' kua-kua* (hamba).² Stratifikasi Sosial atau *Tana'* pada masyarakat Toraja dapat diartikan sebagai suatu sistem pelapisan sosial, yang dapat ditinjau dari fakta dapat dibedakan atas dua lapisan, yaitu: golongan bangsawan dan rakyat jelata. Stratifikasi

¹Kurniati Abidin, *Pengantar Sosiologi & Antropologi*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), 41.

²Muhammad Tobar, dkk. *Hubungan Antara Strata Sosial dalam Masyarakat Modern*, Hasanuddin Journal Of Sociology. Vol. 2 No.1 (2020).

sosial atau pelapisan masyarakat di Toraja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a). keturunan (struktur *Tongkonan*), (b). ekonomi atau harta benda, (c). jasa, (d). sejarah, (e). intelegensi dan politik. Ini lah yang merupakan indikator dan kriteria standar dalam memilih dan menentukan pemimpin dalam kepemimpinan pada masyarakat Toraja.³ Pengaruh stratifikasi sosial (*tana'*) dalam kehidupan masyarakat Toraja. Pengaruh stratifikasi sosial dalam memilih dan menetapkan pemimpin masih ada, karena seorang pemimpin hendaknya berani, kaya, pintar dan seorang bangsawan. Ini menandakan bahwa wewenang mutlak bagi kaum bangsawan berhak untuk memerintah dalam bingkai kepemimpinan.

Sehubungan dengan hal di atas maka yang sering terjadi dalam penentuan seorang pemimpin, seperti dalam pemilihan kepala lembang. Seringkali untuk menetapkan calon "kepala lembang" yang di sulkan masih ditimbang, ditelisik serta diberi penafsiran, yang kemudian dikaji ulang lalu ditetapkan kriteria yang masuk dalam penggolongan "stratifikasi sosial" dalam. Hal inilah Sehingga dalam menetapkan pemimpin "kepala lembang" bukan jiwa kepemimpinannya yang nampak, tetapi lebih kepada dasar dalam menerima kepala lembang adalah stratifikasi sosialnya. Seorang pemimpin terkadang dipengaruhi oleh keadaan statusnya dalam masyarakat, yang juga ikut mempengaruhi "penampilannya" atau aktualisasi diri. Seorang menjadi

³ Rannu Sandaran, "*Stratifikasi Sosial*", Jurnal Lembaga STAKN Toraja, <https://osf.io/preprints/63yaj>, diakses pada 3 maret 2023

pemimpin apabila dia memiliki banyak penunjang, antara lain: kekayaan/harta, keberanian, kepintaran dan kebijakan. Yang mana hal itu bersinggungan dengan status sosial dalam kemasyarakatan bahkan pribadi pemimpin itu.⁴

B. Sifat Sistem Stratifikasi Sosial

Sifat sistem stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Bersifat tertutup (*closed sosial stratification*)

Ciri-ciri struktur stratifikasi pada masyarakat yang bersifat tertutup melarang mobilitas individu antara berbagai lapisan sosial, baik dalam arah meningkatkan status sosial (*social climbing*) maupun menurunkannya (*social sinking*). Sistem sosial yang tertutup seperti ini umumnya hadir dalam masyarakat yang mengadopsi sistem kasta.

2. Bersifat terbuka (*open sosial stratification*)

Dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menguji kemampuannya sendiri, yang dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan kompetensi dan keberhasilan.⁵

⁴ Iskandar, *Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa*, Jurnal Masyarakat Maritim, Vol.1 No.2 (November 2017)

⁵ Kurniati Abidin, *Pengantar Sosiologi & Antropologi*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), 47

C. Pengertian Pemimpin

Para pemimpin memiliki karakteristik, kebiasaan, suasana hati, sifat, dan identitas pribadi yang unik dan khas, sehingga perilaku dan gaya mereka memisahkan mereka dari individu lainnya. Cara atau gaya yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin dalam kehidupannya akan secara pasti membubuhkan pengaruh pada tindakan dan jenis kepemimpinannya. Kepemimpinan melambangkan kekuatan inspiratif, semangat yang bersemangat, dan daya moral yang kreatif, yang mampu menggerakkan para anggota untuk mengubah sikap mereka, sehingga sejalan dengan keinginan dan aspirasi sang pemimpin.⁶

Kepemimpinan ialah kemampuan yang melekat pada individu yang memegang peranan sebagai pemimpin, bergantung pada beragam faktor, baik internal maupun eksternal. Kemampuan kepemimpinan merujuk pada keterampilan dan kapasitas individu tersebut dalam memengaruhi perilaku rekan-rekan mereka, baik dalam aspek pemikiran maupun tindakan. Tiap pemimpin memiliki ciri-ciri dan kebiasaan unik dalam menjalankan tugas kepemimpinan dalam suatu organisasi. Pemimpin memiliki keunikan serta kepribadian khas dalam menjalankan peran kepemimpinan, dan juga memiliki kualitas mengarahkan yang bisa memicu potensi individu.⁷

⁶Hardi Mulyono, *Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.3 No.1 (2018).

⁷Wendi Sepmady Hutahaeen, *"Filsafat dan teori Kepemimpinan"*, (Ahlimedia Press:jl. Ki Ageng Gribig, 2002) hal.1

D. Pengertian Kepala Lembang

Lembang dipimpin oleh kepala lembang yang dipilih secara langsung oleh penduduk setempat. Lembang memiliki status yang setara dengan desa. Kepala Desa/Lembang adalah individu yang memimpin di wilayah lembang, yang memiliki tanggung jawab, peran, hak, kewajiban, dan otoritas untuk mengatur urusan internal lembang dan menjalankan tugas-tugas dari pemerintah serta pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepala Desa diberi mandat atau dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah desa. Posisi Kepala desa adalah posisi pemerintahan yang dipilih oleh warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih melalui proses demokratis atau Proses Pemilihan Kepala Desa (pilkades). Sedangkan, pengangkatan dan pelantikannya dilaksanakan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil dari Pilkades.⁸

Kepala desa/lembang memegang posisi kepemimpinan dalam struktur pemerintahan desa. Masa bakti kepala desa berlangsung selama 6 (enam) tahun, dengan kemungkinan untuk diperpanjang dalam satu periode masa bakti tambahan. Definisi kepala desa menurut beberapa pakar, termasuk Talizidhuhu Ndraha, merujuk pada individu yang memimpin komunitas desa, bertanggung jawab atas aspek-aspek seperti kesejahteraan

⁸Struktur Organisasi, Website Desa Bangun Mulya, <http://bangunmulya.desa.id/organisasi>

masyarakat, perkembangan wilayah, serta hal-hal lain yang menjadi tugas formal kepala desa berdasarkan penunjukan pemerintah.⁹ Adapun tugas dan wewenang Kepala Desa/Lembang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dicantumkan dalam bab V mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pada bagian kedua tentang kepala desa, pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”¹⁰

Peran kepala desa adalah menjalankan tugas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayahnya. Ini meliputi merencanakan pengembangan, mengawasi implementasi proyek, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan. Kepala desa memiliki peran sentral dalam membangun koneksi dengan warga dan menggalang dukungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Sebagai pimpinan di desa, kepala desa bertanggung jawab atas koordinasi dan penyelenggaraan aspek pemerintahan, pembangunan, dan sosial. Selain itu, ia memiliki tanggung

⁹Dody Eko Wijayanto, “Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa”, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1.

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

jawab dalam mengembangkan semangat gotong royong masyarakat untuk mendukung upaya pembangunan yang dilaksanakan.¹¹

E. Pengertian Sistem Kepemimpinan

Sistem kepemimpinan pada mulanya merupakan suatu bentuk dari tingka laku seorang pemimpin yang menunjukkan kualitas pemimpin tersebut. Sistem kepemimpinan merupakan pola yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh bawahannya. Menurut Rivai, sistem kepemimpinan adalah seperangkat gaya yang dipakai pemimpin untuk memimpin/memerintah bawahan agar tujuan organisasi dapat dicapai.¹² Kepemimpinan sering dihubungkan dengan keahlian, kemampuan, dan kualitas pengaruh yang dimiliki seseorang. Sistem kepemimpinan adalah upaya yang digunakan seseorang untuk memimpin. Franklyn dalam Onong Effendy mengemukakan ada tiga sistem/gaya kepemimpinan utama diantaranya:

1. Kepemimpinan Otokrasi

Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang karakternya selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, sombong, mengutamakan kepentingan pribadi di atas tujuan organisasi, menganggap bawahan hanya sebagai alat, tidak mau menerima kritik dan saran serta terlalu mengandalkan kekuasaan formal, gerakan mereka

¹¹Wayan Mahayana, "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Hal. 402.

¹²Nurjaya, Alfia Mukhtar, dkk, *Gaya Kepemimpinan dan Motivasi*, jurnal ekonomi dan bisnis, Vol.2 No.1 (januar-juli 2020)

sering menggunakan paksaan. Indikator gaya kepemimpinan otokratis meliputi: (1) sentralisasi kekuasaan, (2) kerja produktif, (3) kepemimpinan. Setiap keputusan dianggap sah dan pengikut harus mematuhi perintah tanpa bertanya lagi.¹³

2. Kepemimpinan Demokrasi

Kepemimpinan demokratis ialah model kepemimpinan yang ditandai dengan menghormati bawahan sebagai makhluk berharga di dunia ini. Pendekatan ini melibatkan keterbukaan terhadap masukan, serta usaha berkelanjutan untuk mendorong kesuksesan bawahan dan memajukan kemampuan kepemimpinan pribadi mereka. Indikator gaya kepemimpinan demokratis antara lain: (1) hubungan baik antara atasan dan bawahan, (2) menghormati bawahan, (3) menyikapi keinginan bawahan dan mendengarkan.

3. Kepemimpinan Bebas

Tipe kepemimpinan independen atau tidak memihak ini adalah kebalikan dari tipe otokratis. Dengan tipe kepemimpinan ini biasanya menunjukkan perilaku pasif dan menghindari tanggung jawabnya.¹⁴

Selain gaya kepemimpinan di atas ada juga prinsip gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Toman Sony prinsip-prinsip gaya kepemimpinan tersebut antarlain:

¹³ Ibid.

¹⁴ Intan Prameswari dan Ayunin Sofro, "Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis, Premitif dan Otoriter", Jurnal vol 6, No.2, (2018)

a. Melayani

Dalam konsep teori kepemimpinan, seorang pemimpin yang berhasil harus memiliki kapabilitas dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi, yang berdampak positif pada kesejahteraan individu yang berada dalam kepemimpinannya. Berdasarkan gagasan ini, seorang pemimpin mengutamakan kepentingan komunitas yang ia pimpin di atas kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

b. Membuat Keputusan

Pengambilan keputusan adalah tugas terpenting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Membuat keputusan/kesimpulan dan memecahkan masalah adalah bagian dari pekerjaan seorang pemimpin. Langkah-langkah untuk memecahkan masalah adalah: Pilihan, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan, memperluas dan mengevaluasi alternatif, memilih preferensi yang baik, menerapkan dan mengevaluasi hasil.¹⁵

c. Keteladanan

Seorang pemimpin yang memiliki dampak positif serta mencerminkan prinsip-prinsip positif bagi perusahaan dan individu yang mengikutinya bisa menjadi teladan bagi mereka yang ia pimpin. Teladan pemimpin adalah memberi ide, membimbing dan

¹⁵ Suarga, "efektivitas penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan", Jurnal Idaarah, Vol 1, no.1 (juli 2017)

menyemangati, bekerja dengan jujur dan tulus, serta menunjukkan minat dan perhatian.

d. Menciptakan perubahan

Pemimpin harus mencari jalan baru, untuk dapat mencapai pembaharuan yang esensial baik di tubuh organisasi, maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin yang mempunyai inovasi dan kreativitas akan menjauhi model kerja yang bersifat rutin (monoton) sehingga tidak memberikan arah perkembangan yang baik bagi yang dipimpinnya.¹⁶

F. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah bagian yang mengisi hubungan kehidupan organisasi. Kekuasaan kerap hadir dalam masyarakat, baik masyarakat yang masih biasa-biasa saja, maupun yang sudah besa dan rumit susunannya. Kekuasaan merupakan bagian yang mengisi jalinan kehidupan organisasi. Kekuasaan selalu hadir dalam masyarakat, apakah masyarakat itu sederhana atau strukturnya besar atau kompleks.¹⁷ Kekuasaan menurut Pierre Bourdieu sifatnya tidak sederhana, dan sistematis bahkan bukanlah sebuah perkara personal. Menurutnya kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kuasa/modal simbolik, dimana seseorang yang menguasai modal dengan

¹⁶Ibid.,30-31

¹⁷Rivandi dan Alsar Andri, *Teori Kekuasaan*, Jurnal Administrasi Negara, vol.4 no.2 (tahun 2022).

kebiasaan yang cukup menguasai arena dan memenangkan perjuangan sosial karena selalu ada perjuangan sosial di dalam arena.¹⁸

Dalam menyelesaikan sebuah masalah, sangat diperlukan sebuah kekuatan. Kekuasaan merupakan salah satu pokok kajian penting dalam ilmu politik. Tiap harinya, pimpinan dari organisasi publik maupun swasta mengambil serta memanfaatkan wewenang guna mencapai sasaran, dan dalam banyak situasi, meningkatkan kedudukan mereka sendiri. Kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam menggunakan kekuasaannya sangat tergantung pada pemahaman mereka tentang kekuasaan, bagaimana dan kapan menggunakannya, dan kemampuan mereka untuk meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi.

Kekuasaan merupakan sesuatu yang dilegitimasi. kekuasaan dapat dibentuk dan dicapai secara legal (konstitusional) berupa pemilihan umum, perwakilan secara turun-temurun atau secara melawan hukum (inkonstitusional) berupa kudeta, perang atau kekuasaan dengan persekongkolan. Kekuasaan kerap berada dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana, maupun yang strukturnya besar atau kompleks¹⁹. Namun, meskipun kekuasaan selalu ada, ia tidak dapat disebar secara merata pada anggota masyarakat. Struktur organisasi membentuk kekuasaan dan otoritas formal dengan menugaskan

¹⁸ Wawasan Kuswandro, "*Pemikiran Pierre Bordieu Dalam Memahami Realitas Sosial*", <http://wkwk.lecture.ub.ac.id>, diakses pada Minggu, 7 Mei 2023

¹⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 74

perseorangan tertentu dalam melakukan pekerjaan tertentu maupun membuat keputusan tertentu.²⁰ John French dan Bertram Raven mengusulkan tiga dasar kekuasaan antarpribadi.

- 1) Kekuasaan hukum, yaitu kemampuan seseorang untuk menguasai seseorang karena kedudukannya.
- 2) Kekuasaan imbalan (*Reward power*), seseorang memperoleh kekuatan dari kemampuan untuk menghargai ketaatan.
- 3) Kekuasaan paksaan (*Coercive power*), bentuk kekuasaan paksaan ini dipakai untuk memperoleh pemenuhan akan permintaan atau mengoreksi perilaku tidak produktif dalam organisasi.
- 4) Kekuasaan ahli, seseorang dengan keahlian khusus dinilai mempunyai kekuasaan ahli yang tinggi.

Kekuasaan dalam masyarakat Lembang-Marinding sering dimaknai sebagai seseorang yang menduduki posisi khusus dalam kelas sosial masyarakat, dengan kekuasaan/kekuasaan sering dimiliki oleh status sosial atau keturunan seseorang, yang dalam kelas sosial Lembang Marinding dimiliki oleh kelompok *Pa'puangan/Tomakaka*. *pa'puangan* memiliki kekuasaan yang luas dalam masyarakat Lembang Marinding, sehingga masyarakat setempat sering mendengar perkataan dan perintahnya.

²⁰ Risvandi Sentra dan Alsar Andri *Teori Kekuasaan* Jurnal Administrasi Negara, Vol 4, no.2 (2022),1

G. Teori Elit

Teori elit merupakan kaidah ketiga, yang menunjukkan bahwa elit politik merupakan faktor penentu keinginan masyarakat terhadap kehidupan politik. Tiap kelompok masyarakat diatur oleh sebagian kecil individu yang memiliki kualitas yang diperlukan untuk mengemban penuh kontrol dalam urusan sosial dan politik. Inti kekuasaan ada pada mereka yang dianggap terbaik, mereka disebut elite²¹ :

1. Golongan penguasa (*The governing elites*) meliputi individu-individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam struktur pemerintahan dan memegang peran krusial di dalamnya. Mereka ini dikenali atas kedudukan mereka, memiliki kemampuan untuk mengendalikan serta mengambil keputusan strategis, dan mendapat penghargaan serta ketaatan dari masyarakat.²²
2. Golongan non-pemerintahan (*The nongoverning elites*) merujuk kepada individu-individu yang beraktivitas di luar lingkup pemerintahan namun memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan.²³

Mengacu pada asumsi sebelumnya, tampaknya terdapat dua tingkatan kelompok teratas, yakni kelompok yang memiliki peran dalam pengendalian

²¹ Sp Varma,, *Teori Politik Modern*, Jakarta:Rajawali Pers.2010), 200

²³ibid.

dan kelompok yang tidak memiliki peran dalam pengendalian. Kelompok yang memiliki peran dalam pengendalian terdiri dari individu-individu yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, seperti gubernur, walikota, pemimpin pemerintahan, dan para pemimpin partai politik, yang dapat disebut sebagai kelompok elite politik. Di sisi lain, kelompok yang tidak memiliki peran dalam pengendalian adalah kelompok individu yang berada di luar struktur pemerintahan tetapi memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan masyarakat, termasuk kelompok elit agama, kelompok elit tradisional, dan kelompok elit intelektual. Sementara itu, terdapat juga tingkatan lain di antara keduanya, yakni individu-individu dari kelompok non-elite pada keduanya yang memiliki pengaruh yang kuat dalam proses perkembangan masyarakat. Mereka yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, atau sering disebut sebagai elite penguasa atau elite politik, merupakan contoh dari tingkatan kelompok elite tersebut.²⁴

Elite adalah orang berpangkat tinggi yang mampu mencapai posisi tinggi dalam strata sosial yang diperlukan untuk mengontrol kekuasaan sosial politik. Dalam pemilihan kepala daerah di Lembang Marinding, dimana stratifikasi lingkungan masyarakat menghadirkan elite politik lokal, elite

²⁴ Khairul Amin, *Elite dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa*, Jurnal Sosiologi USK, vol.11 no.2 (Desember 2017)

politik lokal memiliki posisi yang sangat strategis di masyarakat karena memegang kekuasaan dalam setiap pesta demokrasi di Lembang Marinding.